

## Daftar Pustaka

### A. Buku:

- E. Utrecht, *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, Cetakan keenam, PT.Penerbit Balai Buku Ichtiar, Jakarta, 1959.
- Fajar ND, Mukti dan Yulianto Achmad., 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Jakarta, Pustaka Pelajar
- Gianfranco Poggi, 1992, *The Development of the Modern State: Sociological Introduction*, California: Stndford University Press.
- Ibnu Anshori, 2006, *Perlindungan Anak Dalam Agama Islam*, KPAI, Jakarta.
- , 2007, *Perlindungan Anak Menurut Perspektif Islam*, KPAI, Jakarta.
- Jimly Asshiddiqie, 2005, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Konstitusi Press, Jakarta.
- Kansil, SH., 1997, *Hukum Tata Negara Republik Indonesia* , PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- Kuhnle dan Hort, "The Developmental Welfare State in the Scandinavia: Lessons for the Developing World" dalam Triwibowo dan Bahagijo, ed., *Mimpi Negara Kesejahteran*, Jakarta, LP3ES, 2006
- Latif, Yudi, 2012, *Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas dan Aktualitas Pancasila*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- M. Yamin, *Naskah Persiapan UUD 1945: Risalah Sidang BPUPKI/PPKI*, Sekretariat Negara RI, Jakarta, 1959.
- Phillipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya, h.29
- Ronny Hanitijo Soemitro, 1994, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Cetakan Kelima, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Satjipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Sentanoe Kertonegoro, 1987, *Jaminan Sosial dan Pelaksanaannya di Indonesia. Cet, II* . Mutiara Sumber Widya, Jakarta.

Soerjono Soekanto, 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI Press

-----, 2012, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali Pers Jakarta

Soeroso, 2006, *Pengantar Ilmu Hukum*, cetakan ke-8, Sinar Grafika, Jakarta,

Subekti, SH, 1994, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, PT. Intermasa, Jakarta.

Sudikno Mertokusumo, 1996, *Mengenal Hukum, Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta

-----, 2009, *Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Suhino, 2000, *Ilmu Negara*, Liberty, Yogyakarta

Triwibowo dan Bahagijo, ed, 2006, *Mimpi Negara Kesejahteraan*, LP3ES, Jakarta

## **B. Peraturan Perundang-undangan:**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Pembayaran Utang

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia tanggal 19 Juni 1980 Nomor M.01.PR.07.01-80 Tahun 1980 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Balai Harta Peninggalan, pasal 2.

Himpunan Peraturan Perundang-undangan Balai Harta Peninggalan

### **C. Makalah dan Wawancara**

Palmawati Tahir, Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, *Kedudukan Wali Dalam Mewakili Ahli Waris Di Bawah Umum Dalam Hukum Positif Terhadap BHP selaku Wali Pengawas*, disampaikan dalam Rakor Balai harta Peninggalan Jakarta di Serang tanggal 3 Juni 2015

Tamsir Chalik, SH, Sekretaris Balai Harta Peninggalan Jakarta. Materi di sampaikan dalam Sosialisasi Peran Balai Harta Peninggalan Dalam Upaya Perlindungan Hukum (Wali Pengawas) terhadap anak Berdasarkan Undang Undang RI No. 23 tahun 2002, Serang, 30 April 2013.

Sumardi, wawancara, Anggota Teknis Hukum Balai Harta Peninggalan Semarang, Semarang, 9 Juli 2018.

Balai Harta Peninggalan Semarang, *Buku Pintar Tugas dan Fungsi Balai Harta Peninggalan*.

### **D. Internet**

<http://rahmanamin1984.blogspot.com/2014/03/hukum-pidana.html>  
diakses tanggal 20 Maret 2018

<https://ngobrolinhukum.wordpress.com/2013/02/05/memahami-kepastian-dalam-hukum> diakses tanggal 21 Maret 2018

<http://rahmanamin1984.blogspot.com/2014/03/hukum-pidana.html> diakses  
10 Maret 2018